

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dari daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun definisi dari otonomi daerah itu sendiri dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan juga kepentingan masyarakat di daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah berwenang untuk mengatur daerahnya sendiri, yang mana daerah diberi kewenangan sendiri disini dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan juga kesetaraan, demokratisasi, dan juga sebuah penghormatan kepada budaya lokal serta mengembangkan keaneka ragaman dan potensi yang ada di daerah. Kewenangan dari pemerintah daerah itu dilaksanakan secara luas dan utuh, yang mana kewenangannya meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap semua aspek pemerintahan yang ada.²

Visi otonomi daerah : dirumuskan dalam 3 ruang lingkup, yaitu :

¹ Dedi supriyady bratakusumah dkk. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta :Gramedia. Hal32

² Ibid,

1. Politik: harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, dan memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif dalam mengakomodir pilar-pilar bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ikha & NKRI)
2. Ekonomi: terbukanya peluang bagi pemda mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya untuk kesejahteraan warga negara Indonesia yang ada didaerahnya.
3. Sosial dan budaya: menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya dalam ruang lingkup sosial dan budaya nusantara.³

Dengan adanya otonomi daerah ini, diharapkan daerah nantinya akan bisa lebih mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di segala aspeknya. Dengan begitu daerah akan menjadi lebih leluasa untuk dapat maju dan mandiri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Potensi itu baik dari sumberdaya alamnya dan juga sumber daya manusianya, dari segi ekonomi, politik dan juga budayanya. Dengan otonomi, daerah menjadi mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa lebih sejahtera. Baik itu di Kabupaten/Kota juga sampai ke pemerintahan terkecil yaitu Nagari.

Nagari merupakan unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, Nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemukiman untuk menjadi Nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan. Dalam pembentukan suatu Nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur

³ Gede Tusan Ardika Sahrul. 2011. *Konsep Dasar Otonomi Daerah Era Reformasi*. Mataram: Universitas Mahasaraswati. Volume 5 No 1.

terendah disebut dengan *Taratak*, kemudian berkembang menjadi *Dusun*, kemudian berkembang menjadi *Koto* dan kemudian berkembang menjadi *Nagari*, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat.⁴

Nagari merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari merupakan basis atau landasan untuk menyusun kekuatan ekonomi, sosial, budaya, politik yang berhubungan dengan pembangunan yang memerlukan penanganan serius dan menyeluruh. Nagari merupakan wilayah administratif terendah yang menjadi tumpuan pembangunan, baik untuk kepentingan Nagari itu sendiri, kepentingan lokal, regional bahkan kepentingan Nasional.⁵

Sejak adanya program transmigrasi, Kabupaten Pasaan Barat menjadi salah satu Kabupaten yang masyarakatnya multietnis, hal ini di karenakan banyaknya suku pendatang dari luar Provinsi Sumatera Barat, ada dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan ada dari luar Pulau Sumatera seperti dari Pulau Jawa dan sebagainya. mereka berdatangan dan menyebar di berbagai daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat melalui program transmigrasi yang di lakukan oleh pemerintahan pusat kala itu. Salah satu yang menjadi tempat persebaran masyarakat transmigrasi itu adalah Kabupaten Pasaman Barat, berbagai macam

⁴*Ibid.*,

⁵ Afdhal Mahatta. 2012. Thesis. *Eksistensi pemerintahan nagari berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia.

etnis masyarakat terdapat disana dan mereka menetap di daerah itu sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat.

Program transmigrasi ini juga menjadi salah satu penyebab terbentuknya dinamika masyarakat multietnis, yang mana pada awalnya program ini adalah memindahkan jutaan orang Indonesia yang padat penduduknya dari pulau Jawa, Bali, dan Madura ke pulau-pulau luar yang penduduknya sedikit demi menciptakan kepadatan penduduk yang merata. Transmigrasi ini di harapkan akan mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lahan dan kesempatan baru bagi para masyarakat pendatang agar perekonomian mereka bisa membaik.

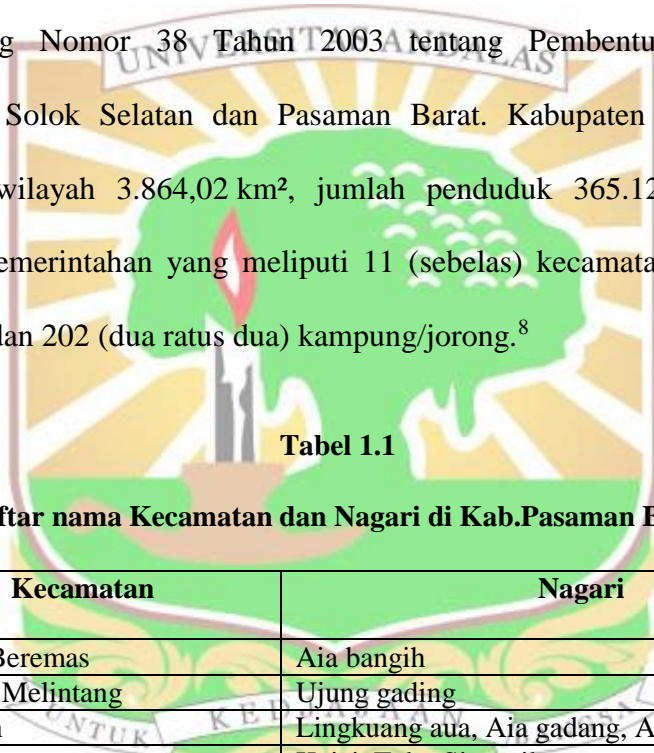
Transmigrasi ini bisa menguntungkan Indonesia karena dapat meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau yang penduduknya masih sedikit. Program transmigrasi ini juga bertujuan untuk menyatukan seluruh masyarakat dengan menciptakan identitas Nasional yang menggantikan identitas daerah. Pemerintah Indonesia tidak ada memisahkan masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang, masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang berkumpul di suatu daerah yang sama dan saling membantu satu sama lain dan hidup berdampingan.⁶

Program transmigrasi ke Sumatera Barat telah terjadi sejak tahun 1936. Orang Jawa yang datang ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Ophir Kinali. Pada tahun 1941, didatangkan lagi orang Jawa dari Jawa Timur untuk menempati daerah baru

⁶ Gusti Asnan. 2009. *Memikir Ulang Regionalisme, Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Volume 10 No 2. Dapat di akses melalui: <https://books.google.co.id>books>. Di akses pada hari selasa, 17-10-2017, Pukul 08.30 Wib.

di Pasaman. Mereka ditempatkan di daerah Batahan, di desa yang bernama Baharoe.⁷

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota Kabupaten di Simpang Ampek. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km², jumlah penduduk 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan, 19 (sembilan belas) Nagari dan 202 (dua ratus dua) kampung/jorong.⁸



Tabel 1.1

Daftar nama Kecamatan dan Nagari di Kab.Pasaman Barat

No	Kecamatan	Nagari
1	Sungai Beremas	Aia bangih
2	Lembah Melintang	Ujung gading
3	Pasaman	Lingkuang aua, Aia gadang, Aua kuniang
4	Talamau	Kajai, Talu, Sinuruik
5	Kinali	Kinali, Katiagan
6	Gunung Tuleh	Muaro kiawai, Rabi jonggor
7	Ranah Batahan	Batahan, Desa baru
8	Sasak Ranah Pasisia	Sasak
9	Sungai Aur	Sungai aua
10	Koto Balingka	Parit
11	Luhak Nan Duo	Koto baru, Kapa

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013

⁷ Eni May. 2006. Jurnal Sastra Daerah. *Potret Tiga Desa Transmigrasi Orang Jawa : Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat*. Penelitian dosen muda. Padang: Universitas Andalas.

⁸Bps Kabupaten Pasaman Barat, Profil Kabupaten Pasaman Barat. Di akses melalui <https://www.pasamanbaratkab.go.id> pada hari selasa, 17-10-2017,pukul 08.40 wib.

Dari data di atas melihat banyaknya Kecamatan dan Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat tentunya masyarakat ataupun penduduk yang berada di dalamnya adalah multi etnis, yang mana masyarakatnya berasal dari suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda dan juga kebudayaan yang beraneka ragam yang membuat tingkah laku, kebiasaan dan bahasa mereka berbeda-beda pula. Hal ini di karenakan banyaknya suku pendatang dari daerah lain yang menetap di Kabupaten Pasaman Barat yang tersebar di berbagai Kecamatan dan Nagari. Sehingga tidak heran di setiap masing-masing Kecamatan dan Nagari yang ada di sana terdapat suku mayoritas dan juga minoritas, tergantung dari daerah masing-masing yang mereka tempati.

Pada tahun 2017 Nagari di Kabupaten Pasaman Barat mekar menjadi 72 kenagarian, yang mana sebelumnya hanya ada 19 Nagari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetujui usul pemekaran dari 72 Nagari yang ada di Kab. Pasaman Barat. Adapun 72 Nagari yang mekar tersebut berasal dari 16 Nagari induk. Sementara itu ada tiga Nagari lagi yang masih mempersiapkan usulan pemekarannya. Gubernur Irwan Prayitno telah menandatangani kode register atas pemekaran Nagari tersebut dan telah di kirim kepada Bupati Pasaman Barat pada tanggal 3 Mei 2017. Adapun pemekaran Nagari tersebut yaitu:

Tabel 1.2

Tabel pemekaran Nagari Kab.Pasaman Barat tahun 2017

No	Nama Nagari	Jumlah pemekaran Nagari
1	Ujung Gading	8 Nagari
2	Lingkung Aua	7 Nagari
3	Aua Kuniang	4 Nagari
4	Aia Gadang	2 Nagari
5	Kajai	2 Nagari

6	Talu	2 Nagari
7	Sinuruik	1 Nagari
8	Kinali	15 Nagari
9	Muaro Kinali	2 Nagari
10	Rabi Jonggor	3 Nagari
11	Batahan	4 Nagari
12	Desa Baru	1 Nagari
13	Parit	5 Nagari
14	Sungai Aua	6 Nagari
15	Koto Baru	7 Nagari
16	Sasak	3 Nagari

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat

Salah satu contoh dari keberagaman etnis yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yaitu berada di Kecamatan Luhak Nan Duo, Nagari Koto Baru dimana dalam Nagari itu di tempati penduduk yang berasal dari berbagai macam daerah yang tersebar di berbagai kampung/jorong yang ada di Nagari Koto Baru dan mereka menetap di sana. Salah satu penyebab terdapatnya masyarakat multi etnis di Nagari ini di karenakan program transmigrasi yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mendatangkan masyarakat dari daerah lain seperti dari Jawa dan Sumatera Utara untuk menetap dan berdomisili bersama pribumi dari Nagari Koto Baru.

Nagari Koto Baru sendiri merupakan salah satu dari 19 Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang mana di Kabupaten Pasaman Barat ini terdapat banyak masyarakat dari berbagai etnis berbeda-beda yang mendiami suatu daerah tertentu di masing-masing Nagari dan juga kejurongan. Mereka bermukim dan mendiami daerah tertu dalam waktu yang sangat lama dan mereka menjadi penduduk asli daerah tersebut dan hidup bersama berdampingan dengan masyarakat pribumi, walaupun tetap dari masyarakat pribumilah yang lebih mendominasi dalam hal jumlah penduduk ataupun suku di setiap Kecamatan,

Nagari, maupun Jorong yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yaitu masyarakat yang berasal dari etnis Minangkabau.

Mereka menetap dan berdomisili di masing-masing kampung/jorong yang berbeda beda, karena di Nagari Koto Baru ini memiliki banyak kampung/jorong yang disana masing-masingnya di tempati oleh mayoritas suku yang berbeda pula. Adapun nama Jorong yang terdapat di Nagari Koto Baru ini antara lain,



Tabel 1.3
Nama Jorong di Nagari Koto Baru

No	Kampung / Jorong	Suku Mayoritas
1	Sariak	Minang
2	Simpang tigo	Batak, minang
3	Pujo rahayu	Jawa
4	Giri maju	Jawa,nias
5	Sungai talang	Minang
6	Mahakarya	Minang
7	Ophir	Jawa,minang
8	Jambak selatan	Jawa, minang,batak

Sumber: Humas Kenagarian Koto Baru

Dari data di atas masing-masing Jorong ditempati oleh mayoritas masyarakat dari suku yang berbeda, hal ini yang membuat Nagari Koto Baru menjadi salah satu Nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang masyarakatnya multi-etnis. Setiap jorong terdapat masyarakat dari etnis yang berbeda-beda walaupun masih di dominasi masyarakat pribumi yang berasal dari suku Minangkabau, namun terdapat pula suatu keberagaman yang mana di dalam satu jorong tersebut didominasi oleh suku di luar Minang, seperti Jawa, Batak, Nias

dan juga ada cina yang menetap disana, sehingga membuat keadaan masyarakat di Nagari Koto Baru ini menjadi multietnis.

Pada tahun 2017 terjadi pemekaran Nagari yang mana Nagari Kota Baru di mekarkan menjadi 7 Nagari. Adapun Nagari yang dimekarkan adalah dari masing-masing kejurongan seperti jorong Simpang tigo, Pujo rahayu, Giri maju, Sungai talang, Maha karya, Ophir, Jambak selatan, Masing-masing Nagari tersebut saat ini masih berstatus Nagari persiapan dengan Nagari induk Nagari Sarik.

Secara sosiologis Nagari ini masih di dominasi oleh masyarakat asli Minangkabau, lalu kemudian masyarakat Jawa dan juga masyarakat Batak. Apabila di lihat dalam bentuk persen (%) Nagari tersebut di diami oleh masyarakat ertnis Minangkabau sebanyak 75%, etnis Jawa 20% dan etnis Batak 5%.⁹ Dari sekian banyak masyarakat yang mendiami Nagari Koto Baru ini maka terlihat masyarakat dari etnis Minangkabau yang masih mendominasi di Nagari Koto Baru ini.

Selain dari Kecamatan Luhak nan duo, ada juga kecamatan Ranah Batahan yang mana disana terdapat salah satu Nagari yang penduduknya didominasi oleh masyarakat diluar etnis Minangkabau yaitu Nagari Desa Baru yang mana masyarakatnya disana didominasi oleh etnis Jawa.

⁹Hasil wawancara dengan tokoh Jawa bernama Pak Agus, warga jorong Pujorahayu yang juga memiliki jabatan di kantor Wali Nagari sebagai bendahara Nagari. Bertempat di kantor Wali Nagari Koto Baru. Pada tanggal 1 Maret 2018. Pukul 10.30 wib.

Tabel 1.4

Nama jorong di Nagari Desa Baru

No	Kampung/jorong	Suku mayoritas
1	Mulyorejo	Batak,minang
2	Sidomulyo	Jawa
3	Sukorejo	Jawa
4	Karang rejo	Jawa

Sumber: Humas kenagarian Desa Baru

Dari data diatas terlihat dimana masing-masing jorong didominasi oleh etnis diluar Minangkabau, yaitu etnis Jawa. Hal ini di karenakan adanya program transmigrasi dari pulau Jawa ke pulau Sumatera yang mana kala itu salah satu daerah tujuannya adalah Nagari Desa Baru. Sehingga hal itu menjadikan Nagari ini Nagari yang unik, dimana sistem pemerintahannya Nagari namun yang menjalankan roda pemerintahan di isi oleh masyarakat yang mendominasi etnis Jawa, lalu Batak dan juga Minangkabau. Bahkan masyarakat etnis Minangkabau sangat sedikit di Nagari Desa Baru ini. Tentu saja ini menjadikan salah satu Nagari multietnis yang sangat menarik untuk di lihat.

Pada tahun 2017 setelah adanya pemekaran Nagari, Nagari Desa baru di mekarkan menjadi dua Nagari yaitu Nagari Desa Baru dan Nagari Desa Baru Barat. Secara sosiologis Nagari ini didiami oleh mayoritas masyarakat bukan asli Minangkabau. Berdasarkan data yang di peroleh oleh Nurkasiah, Nagari tersebut terdiri dari etnis Jawa 70%, etnis Batak 20% dan etnis Melayu/Minang 10%.¹⁰ Dan dari data tersebut jelas terlihat bahwasannya di Nagari Desa Baru masyarakatnya di dominasi oleh etnis Jawa sehingga Nagari ini terlihat unik

¹⁰ Nurkasiah. 2004. Skripsi. *Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari*. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu politik. Padang:Universitas Andalas. Hal 6.

karena sebuah Nagari yang berada di lingkungan Minangkabau namun didiami oleh masyarakat etnis Jawa.

Kedua Nagari ini yaitu Nagari Koto Baru dan Nagari Desa Baru keduanya memiliki keunikan masing-masing yang dapat di lihat perbandingannya. Karena banyak keberagaman yang terdapat disana yang bisa kita lihat dan menjadikan suatu pelajaran bagi kita para peneliti yang ingin melihat bagaimana proses suatu masyarakat multietnis tersebut dalam menjalankan pemerintahan Nagari dan juga melihat representasi politik juga keterwakilan dari masing-masing etnis yang ada di Nagari tersebut dalam pemerintahan Nagari.

Representasi politik sering dipahami sebagai keterwakilan suatu pihak atas pihak lain. Namun konsep ini bukan berarti menjadi konsep mutlak dari representasi. Representasi politik seperti yang dipaparkan diatas merupakan wujud perwakilan dari pihak yang tidak bisa hadir (rakyat) yang mana wakil ini tidak hanya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan pihak yang diwakilinya. Para wakil ini memiliki kebebasan relative dengan menggunakan kemampuannya dalam mempertimbangkan kebijakan apa yang nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pihak yang diwakilinya yaitu rakyat.

Oleh karena tujuan seorang wakil yang demi kepentingan pihak yang diwakilinya, maka rakyat selaku yang diwakili sudah sepantasnya menaruh kepercayaan kepada seorang wakil tersebut. Kepercayaan inilah yang nantinya akan mewujudkan keselarasan antara seorang wakil dan pihak yang diwakilinya. Di dalam praktiknya, representasi politik seringkali beririsan dengan kepercayaan

dari rakyat. Hal ini tentu ada sesuatu yang perlu dikaji mengenai apa yang salah atau kurang tepat dalam praktik representasi politik.¹¹

Permasalahan dari dinamika masyarakat multietnis mulai terjadi di Nagari Koto Baru ketika representasi politik di Nagari ini tidaklah sesuai dengan apa yang seharusnya. Keterwakilan masyarakat yang multietnis ini didalam pemerintahan Nagari Koto Baru tidaklah sesuai dengan realita yang ada dalam struktur pemerintahan di Nagari Koto Baru. Karena di dalam struktur pemerintahan lebih di dominasi oleh etnis Minangkabau, sedangkan etnis lain seperti Jawa, Batak, Mandailing sangat sedikit yang menduduki posisi didalam birokrasi pemerintahan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan representasi politik yang lebih menjamin keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan, yang seharusnya memenuhi kesetaraan dari masing-masing perwakilan etnis yang ada, serta melihat perwakilan dari sisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat yang ada dalam Nagari Koto Baru.

Begitu juga di Nagari Desa Baru, permasalahan yang terjadi disini adalah sebaliknya dari permasalahan yang ada di Nagari Koto Baru, apabila di Nagari Koto Baru yang mendominasi adalah masyarakat etnis Minangkabau maka yang terjadi di Nagari Desa Baru ini adalah yang mendominasi Masyarakat etnis Jawa. dan yang mengisi struktur pemerintahan di Nagari Desa Baru ini juga didominasi etnis Jawa. lalu bagaimana dengan etnis di luar Jawa seperti Batak dan Minangkabau di Nagari Desa Baru ini, apakah mereka tidak mendapatkan posisi

¹¹ Nuri Suseno, 2013, *Representasi Politik*, Jakarta: Puskapol UI.

di pemerintahan, maka nantinya akan dilihat dari representasi politik yang ada. Apakah permasalahannya akan sama dengan Nagari Koto Baru, ataukah ada permasalahan lain di Nagari Desa Baru yang mayoritas masyarakatnya etnis Jawa.

1.2. Rumusan Masalah

Ketika Kabupaten Pasaman Barat ini sudah multietnis, maka akan dapat memicu terjadinya permasalahan, baik itu permasalahan kecil ataupun permasalahan besar yang menyangkut masalah etnis, seperti tidak terwakilinya etnis minoritas yang ada di daerah tersebut dalam pemerintahan ataupun deskriminasi antar suku yang nantinya dapat menjadikan konflik di daerah tersebut dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut tentunya sudah menjadi suatu hal yang biasa terjadi disetiap daerah yang masyarakatnya multietnis, oleh karena itu disini diperlukan bagaimana peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan ataupun aturan-aturan.

Salah satu fakta di Kabupaten Pasaman Barat terdapat peraturan tentang Pemerintahan Nagari yang tidak memberi peluang kepada semua orang untuk bisa duduk di dalam birokrasi ataupun di dalam pemerintahan Nagari. Sehingga ini menjadi salah satu ketimpangan dalam pembuatan aturan yang dapat merugikan etnis-etnis minoritas untuk dapat memiliki jabatan didalam birokrasi pemerintahan Nagari. Apabila ini terus dibiarkan dan efek dari deskriminasi tersebut di rasakan sangat berat bagi etnis minoritas maka kan dapat menimbulkan terjadinya pemberontakan ataupun bisa memicu terjadinya konflik antar etnis.

Masalah yang terjadi berkaitan tentang masalah birokrasi di Kabupaten Pasaman Barat: Pertama, yaitu mengenai peraturan syarat untuk menjadi Wali Nagari, peneliti berasumsi ini menutup peluang orang untuk dapat duduk di

pemerintahan Nagari, padahal tidak semua Nagari di Kabupaten Pasaman Barat mayoritas etnis Minangkabau, seperti di Nagari Koto Baru dan juga Nagari Desa Baru.

Kedua, dalam rekrutmen pemerintahan Nagari sampai hari ini dari beberapa staf-staf di dalam pemerintahan Nagari masih didominasi oleh etnis mayoritas dan tidak ada etnis lain terwakili, seperti di Nagari Kota Baru didominasi etnis Minangkabau, sedangkan di Nagari Desa Baru didominasi etnis Jawa, padahal menurut representasi politik dengan terwakilinya masing-masing etnis secara emosional bisa melancarkan pelayanan terhadap semua masyarakat.

Nagari Koto Baru adalah salah satu contoh Nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang masyarakatnya multietnis yang juga terdapat permasalahan didalamnya, yaitu permasalahan dalam penerapan representasi Politik atau dalam kata lain permasalahan dalam keterwakilan masyarakatnya yang multietnis ini didalam Pemerintahan Nagari.

Tabel 1.5
Struktur jabatan dan etnis dalam pemerintahan Nagari Koto Baru

No	Nama Jabatan	Etnis
1	Wali Nagari	Minang
2	Sekretaris Nagari	Minang
3	Kepala bagian urusan	5 orang etnis minang, 3 orang etnis Jawa
4	Kepala jorong	5 orang etnis minang, 3 orang etnis Jawa
5	Bamus	10 orang etnis minang, 1 orang etnis Jawa
6	KAN	Semua etnis mewakili

Sumber: Humas Nagari Koto Baru

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa dalam pemerintahan Nagari Kota Baru masih didominasi oleh etnis mayoritas yaitu etnis Minang. Dalam

pemerintahan masih terlihat ketidakadilan dalam keterwakilan etnis di Nagari Koto Baru ini, karena dalam keterwakilannya masih didominasi etnis Minangkabau yang menjadi etnis mayoritas di Nagari Koto Baru ini, sedangkan etnis Jawa, Batak, Mandailing keterwakilannya dalam pemerintahan masih sangat minim.

Hal ini tentu memicu kecemburuan sosial antar etnis di Nagari Koto Baru, karena pada dasarnya semua penduduk Nagari mempunyai hak dan peluang yang sama untuk dapat mewakili dan mengisi jabatan-jabatan tertentu di Pemerintahan. Namun dalam kenyataannya tetap saja selalu diwakili dan didominasi oleh etnis Minangkabau. Lalu kenapa etnis Jawa, Batak, Mandailing kurang ataupun tidak terwakili di pemerintahan ini masih menjadi tanda tanya.

Permasalahan antar etnis juga sempat terjadi ketika dalam pencalonan pemilihan Wali Nagari tahun 2014, bagaimana representasi politik akan terwujud dengan baik kalau dalam prosesnya saja sudah terjadi deskriminasi antar etnis. Pada saat itu ketika akan dilakukannya pilwana (pemilihan Wali Nagari) etnis di luar Minang seperti Jawa, Batak, Mandailing tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Hal ini terjadi semenjak di sahkannya Perda no.8 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, yang mana dalam Perda tersebut terdapat aturan dalam penetapan calon Wali Nagari. Peraturan tersebut berbau deskriminasi yang sampai menyebabkan demonstrasi etnis Jawa di Nagari Koto Baru.

Hal ini dipermasalahkan karena terdapat ketentuan yang dimaksud dari pengertian anak Nagari yang terdapat dalam perda no.8 tahun 2011 tercantum dalam Bab 1 (satu) yaitu ketentuan umum, pasal 1, Poin ke 15, yang berbunyi sebagai berikut :

*Anak Nagari adalah ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda serta anak cucu kemenakan dan urang sumando yang tinggal dinagari dan perantauan mempunyai suku secara turun temurun sesuai adat dalam minangkabau dari niniak mamak yang ada di nagari;*¹²

Setiap warga Nagari yang berasal dari luar etnis Minang, ketika dia ingin mencalonkan diri menjadi calon Wali Nagari mereka tersandung oleh pasal yang terdapat dalam perda tersebut. Padahal dalam syarat pencalonan Wali Nagari itu sendiri tidak harus masyarakat dari etnis Minang yang boleh mencalonkan diri, karena di Nagari lain ada Wali Nagari yang di luar etnis Minang yang berhasil menjadi Wali Nagari seperti di Nagari Desa Baru, namun faktanya di Nagari Kota Baru hal ini di permasalahan, tentu saja hal ini menjadi deskriminatif antar etnis.

Peraturan seperti ini tentusaja menghambat terciptanya representasi politik seperti yang di harapkan, karena jelas terlihat bagaimana deskriminasi antar etnis disana. Jika peraturannya seperti itu bagaimana mungkin masyarakat etnis selain Minang seperti Jawa, Batak, Mandailing dsb, akan dapat mencalonkan dirinya, sedangkan mereka tidak mempunyai suku seperti yang tercantum dalam pengertian anak Nagari di atas. Hal ini membuat etnis lain memberontak menuntut keadilan, maka terjadilah demonstrasi etnis pada tahun 2013 di kantor Wali Nagari yang menuntut kesetaraan antar etnis yang ada, karena dalam Nagari tersebut tidak hanya masyarakat dari etnis Minangkabau saja yang ada melainkan masyarakat di sana adalah multietnis ada Jawa dan juga Batak.

Hal ini juga dibenarkan oleh seorang tokoh Jawa yang bernama Agus, dalam sesi wawancara beliau mengatakan sbb:

“Sejak di sahkannya Perda no.8 tahun 2011 tentang Nagari, barulah mulai ada deskriminasi antar etnis dalam pencalonan menjadi Wali Nagari, karena dalam pencalonan periode 2014-2020 Nagari Koto Baru sudah mengacu kepada perda tersebut, dan saat itu PJ Nagari yang menjabat bernama Ibnu Hajar mempermasalahkan bagi

¹² Perda Kabupaten Pasaman Barat no.8 tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari

etnis selain Minang bahwasannya mereka tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon Wali Nagari karena mereka tidak mempunyai suku, sementara yang boleh mencalonkan diri adalah anak Nagari yang mempunyai suku seperti yang terdapat dalam perda. Tentusaja hal ini membuat etnis di luar Minang tidak terima, sehingga mereka berontak dan melakukan demonstrasi”¹³

Selanjutnya di Nagari Desa Baru yang masyarakatnya juga multietnis yang memiliki kesamaan dengan Nagari Koto Baru, dimana dalam Nagari Desa Baru ini didiami oleh masyarakat dengan berbagai macam etnis, namun etnis yang paling banyak adalah berasal dari luar etnis Minangkabau yaitu etnis Jawa. sehingga hal ini menjadikan persamaan juga perbedaan antara Nagari Koto Baru dengan Nagari Desa Baru.

Nagari Desa Baru sendiri dalam pemerintahan di kepalai oleh pemimpin Nagari yaitu Wali Nagari yang berasal dari etnis Jawa, hal ini di karenakan masyarakat di sana mayoritas beretniskan Jawa, wajar saja kalau pemimpin Nagari mereka berasal dari etnis Jawa. sama seperti halnya yang ada di Nagari Koto Baru, karena di dominasi etnis Minangkabau maka yang menang dalam pemilihan wali Nagari adalah dari etnis Minangkabau. Begitu juga dalam perangkat Nagarnya di dua Nagari ini, sama-sama didominasi juga oleh etnis yang mayoritas. Nagari Koto Baru didominasi etnis Minangkabau, sementara itu Nagari Desa Baru didominasi etnis Jawa.

Tabel 1.6

Struktur jabatan dan etnis dalam pemerintahan Nagari Desa Baru

No	Nama Jabatan	Etnis
1	Wali Nagari	Jawa
2	Sekretaris Nagari	Jawa
3	Kepala bagian urusan	7 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Batak/Mandailing

¹³ Hasil wawancara dengan tokoh Jawa bernama Pak Agus, warga jorong Pujorahayu yang juga memiliki jabatan di kantor Wali Nagari sebagai bendahara Nagari. Bertempat di kantor Wali Nagari Koto Baru. Pada tanggal 1 Maret 2018. Pukul 10.30 wib.

4	Kepala jorong	Semua berasal dari etnis Jawa
5	Bamus	8 orang etnis Jawa, 2 orang etnis Batak/Mandailing
6	KAN	Semua etnis mewakili

Sumber: Humas Nagari Desa Baru

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa dalam struktur pemerintahan Nagari Desa Baru masih didominasi oleh etnis Jawa dan juga diikuti oleh etnis Batak/Mandailing sedangkan etnis Minangkabau tidak nampak terwakili. Pada Tahun 2017 terjadi pemekaran Nagari, dan Nagari Desa Baru memekarkan satu Nagari persiapan yaitu Nagari Desa Baru Barat yang Pj Nagarnya juga berasal dari etnis Jawa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam suatu daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang mana masyarakatnya didominasi etnis Minangkabau, dimana pemimpin daerahnya rata-rata adalah masyarakat pribumi yang berasal dari etnis Minangkabau, Hal unik terjadi tepatnya di Nagari Desa Baru, ada Wali Nagari yang memimpin daerah tersebut yang beretniskan diluar etnis Minangkabau, yaitu berasal dari etnis Jawa. Fenomena menjadikan keunikan tersendiri di Nagari tersebut karena dia menjalankan struktur Pemerintahan Nagarnya Menggunakan sistem Nagari namun yang menjalankannya adalah rata-rata masyarakat dari etnis Jawa.

Dengan demikian akan banyak terlihat bagaimana nantinya ada terjadi ketimpangan-ketimpangan didalam birokrasi pemerintahan di masing-masing Nagari, salah satunya permasalahan pelaksanaan representasi politik dalam Nagari Koto Baru dan juga di dalam Nagari Desa Baru yang masyarakatnya multietnis, yang mana mulai ada deskriminasi antar etnis seperti yang terjadi dalam pencalonan Wali Nagari di Nagari Koto Baru, dan keterwakilan antar etnis yang

berada didalam birokrasi pemerintahan di masing_masing Nagari rendah, tentu saja hal ini dapat menghambat terciptanya representasi politik di Nagari Koto Baru dan Desa Baru. Berdasarkan fenomena dan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan representasi politik pada pemerintahan Nagari Koto Baru dan Nagari Desa Baru di Kabupaten Pasaman Barat.?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini dapat di perinci sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan keterwakilan etnis dalam pemerintahan Nagari di Nagari Koto Baru dan Nagari Desa Baru.
2. Untuk menjelaskan alasan dan pertimbangan dalam penerapan keterwakilan etnis pada pemerintahan Nagari di Nagari Koto Baru dan Nagari Desa Baru.
3. Untuk menjelaskan bentuk pelayanan yang di berikan oleh pemerintahan Nagari terhadap masyarakat Nagari di Nagari Koto Baru dan Nagari Desa Baru.

